

KEBIJAKAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DITINJAU DARI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* (STUDI KASUS PADA PT. POLYTAMA PROPINDO)

Defri Aleksander Siwabessy^{1*)}, Chanif Nurcholis²⁾, Hedi Heryadi³⁾

¹Program Pascasarjana Administrasi Publik, Universitas Terbuka
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
defri.siwabessy.ut@gmail.com

²Program Pascasarjana Administrasi Publik, Universitas Terbuka
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
hanif@ecampus.ut.ac.id

³Program Pascasarjana Administrasi Publik, Universitas Terbuka
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
hedi@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

PT Polytama Propindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri petrokimia dengan hasil produksinya berupa resin polypropylene. PT Polytama Propindo sangat menjunjung tinggi upaya perlindungan terhadap lingkungan dan memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan sosial masyarakat melalui kebijakan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Kebijakan CSR PT Polytama berfokus pada lingkungan, kesehatan, dan ekonomi yang diimplementasikan melalui beberapa program yang bersifat *Charity Philanthropy, Social Activity, dan Community Development* yang bertujuan agar program CSR dapat terus berjalan sampai kepada tahap pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana data-data yang diperoleh berupa suatu dokumen, tulisan, dan keterangan dari informan atau sumber informasi yang diteliti dan terpercaya. Jenis penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini, bermaksud untuk memperoleh suatu kumpulan informasi dan mengungkapkan permasalahan yang telah dan akan dihadapi dalam kegiatan program CSR secara mendalam dan komprehensif yang ditinjau dari sudut pandang prinsip *good governance* (Tata laksana yang baik), dan menganalisa penyebab program CSR di PT Polytama Propindo tidak berjalan secara berkelanjutan (*sustainable*). Hasil penelitian bahwa program CSR yang dijalankan belum mencakup seluruh prinsip *good governance*. Prinsip *good governance* yang belum dijalankan secara maksimal adalah prinsip profesionalitas, pelayanan prima, efisiensi, efektivitas, dan responsif atau daya tanggap. Kemudian kurangnya komitmen stakeholder atas proses monitoring dan evaluasi program CSR, sehingga menyebabkan belum tersentuhnya akar permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat penerima program CSR yang akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Diharapkan agar kebijakan program CSR PT Polytama Propindo yang akan datang mempunyai perspektif prinsip - prinsip *good governance* yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga proses monitoring dan evaluasi.

Kata Kunci: Kebijakan, *Corporate Social Responsibility, Good Governance.*

ABSTRACT

PT Polytama Propindo is a company engaged in the petrochemical industry which produces polypropylene resin. PT Polytama Propindo highly upholds efforts to protect the environment and pays special attention to the social welfare of the community through its CSR (Corporate Social Responsibility) policy. PT Polytama's CSR policy focuses on the environment, health, and the economy which is implemented through several programs that are Charity Philanthropy, Social Activity, and Community Development which aim to keep CSR programs running up to the stage of sustainable development. The research method used in this research is qualitative with a descriptive approach, where the data obtained is in the form of a document, writing, and statement from the informant or information source that is researched and trusted. The type of descriptive qualitative research used in this study aims to obtain a collection of information and reveal problems that have been and will be faced in CSR program activities in depth and comprehensively from the point of view of the principles of good



governance, and analyze the causes the CSR program at PT Polytama Propindo is not sustainable. The results of the study show that the CSR programs implemented do not cover all the principles of good governance. The principles of good governance that have not been implemented optimally are the principles of professionalism, excellent service, efficiency, effectiveness and responsiveness. Then the lack of stakeholder commitment to the monitoring and evaluation process of the CSR program, so that the root causes of the problems faced by the recipients of the CSR program have not been touched which will affect the level of community welfare. It is hoped that PT Polytama Propindo's future CSR program policies will have the perspective of good governance principles starting from the planning, implementation, to monitoring and evaluation processes.

Keywords: Policy, Corporate Social Responsibility, Good Governance.

PENDAHULUAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan biasa disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bentuk kepedulian sosial terhadap lingkungan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip *good governance* di dalam proses pelaksanaannya, dimana hal ini telah diatur dalam kebijakan Pemerintah dalam ketentuan UU No. 40 tahun 2007 - Perseroan.Terbatas, Pasal 74 ayat (4) - Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kemudian ketentuan tentang TJSL yang diatur PP No. 47 tahun 2012 perihal TJSL Perseroan Terbatas. Sejalan dengan undang-undang di atas, Bupati Indramayu mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 19/2012 Tentang proses pelaksanaan dan kewajiban TJSL sekitar perusahaan. Peraturan Daerah (Perda) tersebut mengatur proses CSR mulai dari pelaksanaan mekanisme penyaluran CSR, bidang atau jenis CSR, pengaturan fungsi pembinaan, pengawasan, serta pembiayaan CSR. Pemerintah Kabupaten Indramayu berkomitmen bahwa program kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (PKTJSL) atau program Corporate Social Responsibility (CSR) wajib dilaksanakan perusahaan seperti BUMD, BUMN, Swasta dan lainnya yang mendirikan usahanya di Kabupaten Indramayu.

PT Polytama Propindo adalah perusahaan yang memiliki usaha di bidang industri petrokimia dengan hasil produksinya berupa resin polypropylene yang sangat dibutuhkan bagi bahan baku plastik dalam negeri. PT Polytama Propindo mulai melakukan proses produksi di bulan Juli tahun 1995 dengan produknya yang bernama Masplene®, mendapat pasokan bahan baku berupa gas propylene yang mempunyai tingkat kemurnian tinggi ini dari Unit Pengolahan UP-VI, sekarang berganti nama menjadi RU-VI Pertamina area Balongan. Satu tahun berikutnya di tahun 1996 jumlah produksi pabrik meningkat menjadi 180.000 ton setiap tahun. Dan dikarenakan kapasitas produksi gas propylene Pertamina yang meningkat, maka sejak tahun 2004 PT Polytama Propindo terus berusaha untuk mengejar kapasitas produksi menjadi 200.000 ton per-tahun. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2020 PT Polytama Propindo berusaha memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri atau domestik dengan meningkatkan kembali kapasitas hasil produksinya hingga 300.000 ton per tahun. Saat ini posisi perusahaan PT Polytama Propindo adalah salah satu anak usaha dari PT Tuban Petrochemical Industries dimana 51% saham dari Tuban Petro sudah dimiliki oleh Pertamina.

Program CSR PT Polytama Propindo memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar wilayah operasi perusahaan. Realisasi dana program CSR PT Polytama Propindo sejak tahun 2018 mencapai rata-rata Rp7 miliar setiap tahunnya. Program CSR yang dilaksanakan oleh PT Polytama Propindo ini dilakukan di wilayah Kecamatan Juntinyuat yang memiliki luas 277 Ha dan luas wilayah Kabupaten Indramayu yakni 204.011 Ha, serta sebagian besar profesi masyarakat sekitar Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu ini adalah nelayan dan petani. Kemudian berikut adalah beberapa program CSR yang sudah dilaksanakan oleh PT Polytama Propindo:



1. Program Manajemen Sampah Zero (Masaro), pengelolaan sampah plastik ke dalam produk-produk yang bermanfaat, edukasi dan sosialisasi manajemen sampah secara intensif.
2. Program Meng-Posyandu (Ibu Cerdas, Bayi Sehat), upaya pendidikan dan peningkatan kapasitas kader kesehatan dan Ibu hamil untuk menekan AKI dan AKB serta pemberian makanan tambahan.

Program CSR tersebut di atas memang sudah dilaksanakan, namun permasalahan yang ada saat ini adalah mengapa program CSR yang berkelanjutan belum berjalan dengan maksimal sehingga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah apakah pelaksanaan kebijakan program CSR PT Polytama Propindo sudah sesuai dengan prinsip *good governance*.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai cara untuk mencari data penelitian, mengolah data dan melakukan analisis data hasil penelitian tersebut dengan pendekatan deskriptif, dimana data-data yang diperoleh berupa suatu dokumen, tulisan, dan keterangan dari informan berupa sumber informasi yang terpercaya. Jenis penelitian kualitatif deskriptif ini digunakan untuk memperoleh suatu kumpulan informasi dan mengungkapkan permasalahan yang telah dan akan dihadapi dalam kegiatan program CSR PT Polytama Propindo yang ditinjau dari sudut pandang prinsip *good governance*, dan menganalisa penyebab program CSR di PT Polytama Propindo tidak berjalan secara berkelanjutan (*sustainable*).

PEMBAHASAN

Kebijakan program CSR PT Polytama Propindo ditinjau dari prinsip *Good Governance*

Proses kebijakan publik yang dilakukan oleh PT Polytama Propindo melalui program CSR akan berjalan dengan baik apabila terdapat realisasi program yang jelas dan memiliki dasar pelaksanaan program yang kuat. Menurut Nugroho (2003:158), ada dua langkah yang dapat dilakukan agar proses implementasi kebijakan publik dapat berjalan dengan baik, yaitu langsung mengimplementasikan ke dalam bentuk program-program, atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Dari dua upaya pilihan implementasi kebijakan publik ini, ada baiknya memperhatikan program apa dan bagaimana bentuk program yang sesuai dengan realitas sehingga dapat memenuhi kepentingan publik.

Program-program CSR yang telah dilaksanakan oleh PT Polytama Propindo terlihat jelas bahwa kebijakan program CSR belum berjalan dengan maksimal bahkan tidak berjalan secara berkelanjutan. Proses kebijakan program CSR memang telah direncanakan, dan dilaksanakan. Namun tujuan atau output dari program CSR itu sendiri belum tercapai seperti Program I-MASARO dan MENG-POSYANDU. Realisasi program CSR yang berjalan hanyalah yang bersifat *Charity Philanthropy* yang berarti kegiatan CSR bersifat insidental, karitatif, atau program jangka pendek.

Konsep CSR yang disampaikan oleh Bowen (1953) adalah agar setiap pelaku bisnis yang menjalankan usahanya agar sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat di lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi. Istilah sejalan dalam konteks CSR dengan maksud untuk meyakinkan perusahaan tentang perlunya memiliki visi strategik yang melampaui kinerja finansial perusahaan dan dapat menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian konsep CSR dari John Elkington yang menyatakan bahwa CSR merupakan satu kesatuan dari tiga komponen prinsip yakni: *Profit, Planet, dan People* (3P). Namun di dalam kebijakan



program CSR PT Polytama Propindo sebaiknya mempunyai perspektif prinsip *good governance* dan memperhatikan kesejahteraan kehidupan masyarakat yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk keberlanjutan program CSR. Untuk itu, strategi program CSR dapat dimulai dengan menetapkan visi dan rencana jangka panjang berkenaan dengan kebijakan program CSR. Dengan adanya prinsip *good governance*, PT Polytama Propindo dapat menjadikannya sebagai acuan dasar pertimbangan dan perumusan strategi CSR agar program CSR yang dilakukan dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Perusahaan pun mencari strategi-strategi yang tepat agar sesuai dengan visi misi perusahaan, tujuan CSR, objek CSR, dan kebutuhan riil dari stakeholder. Program CSR yang berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan dan mengembangkan kehidupan masyarakat agar lebih sejahtera dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah suatu tindakan nyata dari PT Polytama Propindo terhadap pelaksanaan supremasi hukum di dalam penerapan *good governance* yakni mentaati aturan hukum yang berlaku dan upaya merealisasikan tujuan yang tersirat dalam kebijakan perundang-undangan No. 40 Tahun 2007, Pasal 74 ayat (4) Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Kebijakan program CSR yang dilaksanakan oleh PT Polytama Propindo juga tidak dapat terlepas dari prinsip-prinsip *good governance* yang tertuang di dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (d) Tentang Prinsip Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*). diantaranya adalah profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Supremasi hukum dalam lingkup CSR akan berarti apabila aturan hukum tersebut di implementasikan, dan Undang-Undang terkait dengan CSR hanya akan mempunyai nilai yang evaluatif jika direspon dengan baik oleh perusahaan yang menjalankan program CSR, dalam hal ini adalah PT Polytama Propindo. Supremasi hukum dalam program CSR akan terlaksana dengan baik dengan adanya aktualisasi atau tindakan nyata yang berjalan sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi PT Polytama Propindo dengan dilandasi nilai dan rasa keadilan. Oleh karena itu, supremasi hukum berperan sebagai pendorong meningkatkan nilai kemasyarakatan yang bermanfaat bagi warga masyarakat ataupun stakeholder terkait program CSR yang dijalankan.

Pelaksanaan program CSR menjadi salah satu strategi PT Polytama Propindo untuk mengenalkan citra perusahaan kepada Pemerintah dan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Namun di dalam pelaksanaan program CSR, PT Polytama Propindo juga menemukan hambatan seperti program CSR yang tidak berjalan secara berkelanjutan, serta dampak yang terjadi karena program CSR tidak berjalan secara berkelanjutan. Berdasarkan data hasil penelitian terhadap program CSR yang telah dijalankan, peneliti akan membahas kebijakan program CSR PT Polytama Propindo dalam kaitannya dengan prinsip *good governance*. Oleh karena itu konsep dan teori dari CSR dan *good governance* diharapkan dapat membantu PT Polytama Propindo di dalam kebijakan program CSR sehingga dapat menentukan strategi perusahaan yang lebih terarah, terstruktur dan fokus terhadap visi misi perusahaan serta lebih baik lagi di tahun berikutnya.

Kebijakan program CSR yang dilaksanakan oleh PT Polytama Propindo memiliki Visi Strategik (*Strategic Vision*) yang cukup baik dengan program CSR I-MASARO dan program MENG-POSYANDU dimana pengertian dari Visi Strategik adalah visi yang mudah diartikulasikan, mudah dipahami, diterima semua pihak. Mengapa visi harus strategik ? karena Visi yang mudah untuk dipahami dan dapat diterima oleh semua pihak, diharapkan semua stakeholder CSR memiliki



komitmen yang tinggi pada organisasi, sehingga pengambilan keputusan untuk perencanaan dan pelaksanaan dalam program CSR dapat dihasilkan dan dilaksanakan dengan baik. Namun kondisi aktual di lapangan, visi dari kebijakan program CSR PT Polytama Propindo belum di implementasikan secara maksimal. Hal ini bisa saja terjadi karena visi yang ditetapkan hanya baik secara teori tanpa adanya social mapping dan penerapan prinsip *good governance* di sekitar perusahaan yang menjadi target program CSR, kemudian visi program CSR yang ditetapkan oleh PT Polytama Propindo masih bersifat top-down, dimana Perumusan dan perencanaan program CSR ini belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat disekitar perusahaan. sehingga program CSR yang dijalankan belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.

Bentuk kebijakan program CSR yang telah dilaksanakan oleh PT Polytama Propindo adalah *Charity*, *Social Activity*, dan *Community Development*. Program CSR yang berbentuk *Charity Philantrophy* berarti kegiatan CSR bersifat insidensial, karitatif, program jangka pendek, dimana masyarakat hanya menjadi objek yang memperoleh bantuan, Contohnya antara lain: bantuan bencana alam (banjir, dan lainnya), bantuan sembako, bantuan hari raya, bantuan masyarakat sekitar, pemberian produk, dan lainnya.

Hasil penelitian terkait pengembangan pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa proses pelaksanaan dalam program I-MASARO tidak berjalan dengan maksimal karena masing-masing stakeholder belum memiliki komitmen yang cukup kuat untuk melaksanakan program CSR tersebut. Seharusnya di saat mitra diberi kesempatan menjadi bagian dari stakeholder dan mendapat kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan yang telah dikelola secara bersama-sama melalui aktifitas kegiatan yang produktif, bisa menjadi suatu motivasi bagi kesejahteraan mereka. *Stakeholder* dikatakan berjalan dengan ideal adalah apabila semua unsur *Stakeholder* Primer atau *Stakeholder* Sekunder memperhatikan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan program CSR yang telah disepakati. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Good governance* bagi *stakeholder* kiranya dapat meningkatkan nilai tambah untuk pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dalam mencapai tujuan program CSR yang telah disepakati bersama.

Terkait dengan partisipasi pemerintah, sektor *private* (swasta) maupun masyarakat dalam pelaksanaan program CSR. Proses kebijakan program CSR di PT Polytama Propindo cukup melibatkan partisipasi aktor-aktor yang berkepentingan, seperti Pemerintah Daerah, Kepala Desa, RW, RT sampai kepada tokoh masyarakat. Sampai saat ini keterlibatan dari para aktor adalah memberikan akses informasi dan proses koordinasi implementasi program CSR. Sehingga program CSR diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan di tengah kehidupan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional PT Polytama Propindo. Prinsip *good governance* mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara 3 aktor yang berperan yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*). Penerapan *good governance*, harus dilakukan oleh masing-masing pihak untuk dapat saling berkontribusi dan saling mengawasi, sehingga tujuan dari program CSR yang berkelanjutan dapat tercapai dengan maksimal.

Profesionalitas tenaga kerja atau karyawan PT Polytama Propindo yang terlibat di dalam pelaksanaan program CSR juga sangat kurang. Dimana salah satu sistem pendukung di dalam pelaksanaan kebijakan program CSR yang baik adalah profesionalitas dari pelaksana kegiatan program yang berpengalaman, sudah mendapatkan pelatihan mengenai CSR, atau memiliki sertifikasi keahlian tentang CSR. Namun berdasarkan hasil proses wawancara dengan karyawan PT Polytama Propindo yang ikut langsung di dalam proses pelaksanaan CSR mengatakan bahwa karyawan PT Polytama Propindo yang terlibat langsung di dalam pelaksanaan CSR tersebut belum mendapatkan pelatihan ataupun memiliki sertifikasi keahlian tentang CSR. Dan bilamana dilihat dari struktur



organisasi PT Polytama Propindo yang terlibat langsung dalam program CSR, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan hanya berjumlah 5 karyawan. Salah satu studi implementasi kebijakan dari Edwards III (1980:10) yang mempengaruhi idealnya sebuah kebijakan adalah Sikap Pelaksana (*Dispotition*). Kapabilitas dari seorang karyawan dalam menjalankan program CSR erat kaitannya sebagai Faktor Sikap Pelaksana (*Dispotition*) dimana pelaksana harus memiliki kapabilitas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan serta mempunyai keinginan untuk melaksanakan program CSR tersebut dengan baik.

Proses monitoring dan evaluasi program yang dilakukan oleh PT Polytama Propindo memang telah dilakukan, proses pendampingan yang terus menerus dilakukan oleh PT Polytama propindo (dalam hal ini kegiatan monitoring dan evaluasi) kepada masyarakat ataupun unsur stakeholder yang berpartisipasi dalam program CSR diharapkan akan mengurangi risiko program terhenti karena dinamika kesadaran masyarakat sekitar program CSR dilaksanakan yang tidak bisa dijaga dan dikelola dengan baik. Hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pedoman peningkatan mutu dan kualitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, sehingga program yang dibangun dapat memberikan manfaat yang besar dan luas bagi masyarakat.

Kegiatan monitoring dan evaluasi bertujuan melihat dan mengukur kesesuaian rencana program dengan realisasi yang terjadi di lapangan. Kegiatan ini juga melihat perubahan apa saja selama proses di lapangan dan apa saja yang dilakukan guna memastikan program tetap berjalan baik dan mencapai tujuannya. Dalam laporan ini, pelaksanaan monitoring dan evaluasi bertujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui realisasasi kesesuaian program
- b. Melihat bukti perbaikan program
- c. Mengidentifikasi institusi sosial dan ekonomi yang terbentuk akibat program
- d. Sebagai alat pengambil keputusan atau kebijakan pengembangan dan replikasi program.

Output atau hasil yang diharapkan dari kegiatan monitoring dan evaluasi dari program CSR yang dilaksanakan ini yaitu:

- a. Adanya hasil realisasi kesesuaian program
- b. Adanya monitoring program
- c. Terdokumentasinya bukti perbaikan program
- d. Adanya hasil identifikasi institusi sosial dan ekonomi yang terbentuk.

Berdasarkan penjabaran proses monitoring dan evaluasi yang ideal pada bacaan di atas, pada dasarnya transparansi akan informasi yang jelas atas proses monitoring dan evaluasi di dalam pelaksanaan program CSR sudah dilakukan untuk beberapa program CSR seperti I-MASARO dan MENG-POSYANDU. Namun berdasarkan hasil penelitian terhadap proses monitoring dan evaluasi program tersebut, tidak serta merta menjamin bahwa program CSR berjalan secara berkelanjutan. Karena meskipun program monitoring dan evaluasi sudah dilakukan, masih saja aktualisasi tindakan atas hasil monitoring dan evaluasi tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh daya tanggap atau responsif dari perusahaan belum maksimal dalam mengenali kebutuhan masyarakat. Daya Tanggap (*Responsiveness*) dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Responsif mempunyai pengertian cepat tanggap untuk mengetahui, menyediakan dan memberikan suatu dukungan dan kesempatan kepada masyarakat. Responsif menjadi tolok ukur apakah kepentingan dan masalah-masalah yang dialami oleh komunitas sudah terakomodasi dengan baik atau belum. Hal ini



menunjukkan sejauh mana perusahaan memberikan tanggapan terhadap berbagai isu sosial, yakni tanggapan yang bersifat proaktif sampai ke tanggapan yang bersifat reaktif.

Terkait dengan daya tanggap yang belum maksimal, hal tersebut berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi dari program CSR yang dilaksanakan sehingga belum mempunyai efek positif yang berarti. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness & Efficiency*) memiliki tujuan ideal dari suatu proses implementasi kebijakan program CSR PT Polytama Propindo dapat berdampak positif dan berdaya guna bagi masyarakat, namun pada kenyataannya, program CSR yang dijalankan oleh PT Polytama Propindo hanya mempunyai efek jangka pendek tanpa adanya keberlanjutan rencana jangka panjang. Pattern (1992) dalam Nor (2011:92) mengatakan bahwa usaha yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola legitimasi agar efektif, yaitu dengan cara:

- a. Melakukan identifikasi dan komunikasi/dialog dengan publik;
- b. Melakukan komunikasi dialog tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsinya tentang perusahaan;
- c. Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan, terutama terkait dengan masalah tanggungjawab sosial (*social responsibility*).

Kebijakan dalam program CSR PT Polytama Propindo akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi masyarakat. Setiap aktor yang berperan dalam program CSR harus sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dari kebijakan pemerintah. Namun bila terjadi hal sebaliknya dimana perilaku aktor tidak sesuai dengan tujuan dari kebijakan pemerintah, maka kebijakan program CSR tersebut tidaklah efektif. Menurut Kraft dan Furlong (2004: 4) “kebijakan publik merupakan cara pemerintah dalam mengambil suatu tindakan atas suatu masalah sosial. Dimana masalah sosial tersebut adalah kondisi yang secara luas dianggap tidak dapat diterima oleh publik dan oleh karena itu memerlukan suatu intervensi”. Hal ini senada dengan pernyataan Mulyadi (2016) yang menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan rumusan dari keputusan pemerintah yang dijadikan pedoman untuk mengatasi masalah publik serta mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. Oleh karena itu, PT Polytama Propindo mempunyai peran penting dalam mewujudkan masalah sosial melalui pelaksanaan kebijakan program CSR.

Mengapa Program CSR yang berkelanjutan (*sustainable*) belum berjalan dengan maksimal

Program CSR yang tidak berkelanjutan di PT Polytama Propindo diantaranya adalah Program I-MASARO dan POSYANDU. Dan beberapa program yang bersifat Charity, di mana bantuan akan terhenti pada titik tertentu tanpa memerhatikan kelangsungan hidup selanjutnya dari masyarakat yang menerima bantuan CSR tersebut. Untuk mendapatkan dampak yang lebih besar dari program Charity, perusahaan dapat melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program CSR yang berkelanjutan bagi kesejahteraan hidup masyarakat sekitar perusahaan.

Melihat hasil penelitian kebijakan program CSR PT Polytama Propindo dan ditinjau dari prinsip *good governance*, maka ada beberapa penyebab yang membuat program CSR belum berjalan secara berkelanjutan. Dari sisi faktor akuntabilitas, Akuntabilitas menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) adalah kewajiban untuk memberikan tanggung jawab serta menjawab untuk menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dalam lingkup hasil penelitian program CSR di PT Polytama Propindo ini mengarah kepada komitmen dari semua unsur stakeholder. Hal inilah yang sepertinya belum terlihat dari pelaksanaan program CSR I-MASARO dan program MENG-POSYANDU Apabila akuntabilitas belum dapat dilakukan secara konsisten oleh setiap unsur stakeholder, maka akan berdampak kepada



fungsi monitoring dan evaluasi serta tujuan atau hasil yang diinginkan dari program CSR. Tentunya setelah program CSR tersebut selesai dijalankan, maka prinsip akuntabilitas akan berperan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini, siapakah yang harus bertanggung jawab atas program CSR yang dijalankan, kepada siapa personil tersebut harus bertanggung jawab, untuk hal apa mereka bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan program CSR tersebut, dan konsekuensi apa yang harus ditanggung terhadap program CSR yang dijalankan tersebut.

Faktor akan daya tanggap (*Responsiveness*) terhadap program CSR menjadi salahsatu penyebab program CSR yang berkelanjutan (*sustainable*) belum berjalan dengan maksimal. Saat ini kebijakan program CSR memang telah di implementasikan oleh PT Polytama Propindo, namun bila ditinjau dari prinsip Daya Tanggap (*Responsiveness*), cukup terlihat dari data hasil penelitian bahwa prinsip ini belum berjalan dengan baik, karena setelah proses pelaksanaan yang dimulai dari sosialisasi hingga proses eksekusi berjalan, program CSR tersebut tidak berjalan secara berkelanjutan. Seharusnya PT Polytama Propindo mencari informasi apa sebab atau permasalahan program ini tidak berjalan dan memberikan solusi dari permasalahan yang ada dari masing-masing program tersebut. terutama program yang cukup berkaitan terhadap pengembangan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penyebab selanjutnya adalah faktor Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness & Efficiency*). Menurut Siagian (2001 : 24) “efektif ialah pemanfaatan akan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalandkannya”. Oleh karena itu, bila definisi efektif dikaitkan dengan hasil penelitian kebijakan program CSR dari PT Polytama Propindo, maka program CSR tersebut belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pogram CSR yang dijalankan hanya mempunyai efek jangka pendek (*Program Charity*) tanpa adanya keberlanjutan rencana jangka panjang seperti yang terjadi terhadap program CSR I-MASARO dan program MENG-POSYANDU. Setiap program yang dijalankan dapat dikatakan efektif dan efisien apabila berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasi dan terus berjalan secara mandiri.

Program CSR tidak berkelanjutan lainnya menurut faktor implementasi kebijakan Edwards III (1980:10) yaitu faktor Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*) perlu diperhatikannya struktur birokrasi, karena meskipun sumber daya untuk melaksanakan implementasi kebijakan sudah cukup, dan pelaksana sudah mengetahui kewajiban dan tanggung jawabnya mengenai apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, Namun proses implementasi kebijakan masih dapat terhambat oleh tidak efisiennya struktur birokrasi. Oleh karena itu, struktur dan penempatan personil di dalam struktur birokrasi harus efektif dan efisien. Program CSR belum berjalan secara berkelanjutan (*sustainable*) juga disebabkan oleh prinsip Visi Strategik (*Strategic Vision*) yang tidak didukung oleh pelaksanaan program CSR yang baik, diantaranya adalah 2 program seperti Program I-MASARO dan POSYANDU. Dan program yang bersifat Charity, dimana bantuana akan berhenti pada saat titik tertentu tanpa adanya perhatian terhadap kesejahteraan hidup dari masyarakat yang menerima bantuan CSR tersebut. Hal ini dikarenakan program CSR yang dijalankan hanya berpengaruh dalam jangka pendek. Prinsip Visi Strategik yang baik adalah adanya strategi jangka Panjang atau CSR yang berkelanjutan.

Berdasarkan pembahasan di atas perihal program CSR PT Polytama Propindo yang belum berjalan secara maksimal, sebaiknya PT Polytama Propindo ikut sejalan dengan dengan semangat dari ketentuan pemerintah UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Perpres No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Disamping program keberlanjutan bersifat lingkungan, program pemberdayaan kesejahteraan masyarakat merupakan hal



penting yang sebaiknya diperhatikan oleh PT Polytama Propindo dalam pencapaian tujuan program CSR.

Dampak dari program CSR yang berkelanjutan (*sustainable*) belum berjalan dengan maksimal

a. Ketergantungan masyarakat terhadap program CSR

Dampak yang akan terjadi dikarenakan program CSR tidak berjalan secara berkelanjutan adalah timbulnya ketergantungan masyarakat kepada perusahaan terhadap program-program jangka pendek seperti donasi/amal/sumbang dan program lainnya yang hanya bersifat charity. Kemudian dengan belum maksimalnya program CSR dengan konsep community development yang menekankan pada pembangunan sosial pembangunan kapasitas masyarakat, di mana sebenarnya korporasi dapat diuntungkan dengan program-program yang dilaksanakan, baik program dalam jangka pendek atau jangka panjang. Selain itu PT Polytama Propindo juga dapat membuat ruang bagi masyarakat sekitar perusahaan dengan meningkatkan potensi sosial-ekonomi masyarakat, menyediakan peluang kerja yang tentunya akan membutuhkan tenaga kerja dengan kriteria yang sesuai dengan program yang dilaksanakan. Proses pembangunan yang berkelanjutan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, pengelolaan lingkungan hidup menjadi lebih baik dan meningkatkan perekonomian. Dimana hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* dalam Rahman (2009:10) “Komitmen dari perusahaan terhadap berjalannya proses kesinambungan untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, menyejahterakan para karyawan dan keluarganya, komunitas lokal serta masyarakat luas pada umumnya agar memiliki kualitas hidup yang baik”.

Ketergantungan masyarakat terhadap program CSR ini juga disebabkan oleh karena belum tersentuhnya akar permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa, betapa pentingnya proses social mapping, *Forum Group Discussion (FGD)* untuk menyatukan goals dan persepsi perusahaan, pemerintah setempat dan masyarakat agar program CSR yang akan dilaksanakan dapat bersifat bottom up.

b. Citra negatif terhadap PT Polytama Propindo

Dampak lain yang timbul karena program CSR I-MASARO dan program MENG-POSYANDU tidak berjalan perusahaan. Meskipun program CSR dalam bentuk yang lain juga telah dilaksanakan dengan baik oleh PT secara berkelanjutan adalah dampak negatif terhadap citra dari PT Polytama Propindo. Hal ini cukup menunjukkan pandangan bahwa terkesan PT Polytama Propindo tidak memperhatikan lingkungan sekitar perusahaan dan lingkup sosial masyarakat sekitar wilayah operasi PT Polytama Propindo namun hanya bersifat charity, insidental, karitatif, dan program jangka pendek. Bila terus dibiarkan tanpa adanya program perbaikan dan evaluasi yang baik dari PT Polytama Propindo, maka hal ini akan berdampak buruk terhadap citra perusahaan di mata masyarakat sekitar. Kepercayaan dari masyarakat adalah faktor yang cukup mempengaruhi eksistensi suatu perusahaan.

Adanya program CSR yang berkelanjutan, akan menguatkan ikatan perusahaan dengan stakeholder di sekitar wilayah operasi, dimana salah satunya adalah kehadiran masyarakat yang merasakan perubahan akan kesejahteraan lingkungan dan sosialnya. Implementasi program CSR yang baik dan tepat sasaran serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak positif terhadap citra perusahaan. Brammer dan Millington (2005) di dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa setiap perusahaan yang terlibat dalam acara amal atau bakti sosial dapat meningkatkan citra dan reputasi perusahaan.

c. Tingkat kesejahteraan masyarakat

Pelayanan prima merupakan salah satu prinsip dari *good governance* yang terkait antara hubungan proses dan output. Karena bila proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan berdasarkan atas prinsip-prinsip *good governance*, maka hasil yang diharapkan adalah pelayanan prima, dan dampak dari pelayanan prima semoga dapat memberikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip *good governance* dan proses pelayanan yang prima menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Tingkat kesejahteraan masyarakat cukup terpengaruh dengan tidak berjalannya program CSR secara berkelanjutan, contohnya adalah program I-MASARO yang belum berjalan dengan maksimal, masyarakat diharapkan dapat memproses sampah-sampah di Desa Timupuk dengan baik meskipun di tengah pandemi covid-19. Dan untuk saat ini masyarakat berinisiatif untuk melakukan proses pembakaran sampah dengan swadaya masyarakat sekitar agar tumpukan sampah dapat dikurangi. Dampak dari belum berjalannya program I-MASARO ini tentunya mempunyai andil di dalam hasil pencapaian kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu sebagaimana tabel dibawah ini perihal Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Indramayu.

Tabel 1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Standar Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68.71	57.97	84.37

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu

Kemudian program CSR yang tidak berkelanjutan berikutnya adalah Program MENG-POSYANDU, dimana salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi dalam memperhatikan kesehatan dan tumbuh kembang bayi atau anak. Salah satu cermin dari kesejahteraan masyarakat dalam bidang Kesehatan adalah tingkat kesehatan. Dalam hal ini program CSR yang dilakukan oleh PT Polytama Propindo terkait dengan kesehatan Ibu dan bayi. Contohnya adalah angka kematian ibu dan bayi yang menjadi indikator tingkat kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu di Kabupaten Indramayu pada tahun 2019 sejumlah 40 kasus, dan pada tahun 2020 menurun menjadi 38 kasus. Dan kemudian angka kematian bayi di tahun 2019 sejumlah 246 kasus, dan pada tahun 2020 menjadi 209 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Ibu dan bayi di Kabupaten Indramayu memang semakin membaik namun tidak signifikan.

Menurut Badan Pusat Statistik, Indikator Kesejahteraan Rakyat adalah kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan/tenaga kerja, kesehatan dan gizi, taraf dan pola konsumsi, kemiskinan, perumahan dan lingkungan, serta hal sosial yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup. Mengacu kepada persentase Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Kabupaten Indramayu dalam periode 2018 hingga 2020 dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia 2018-2020

Wilayah Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia		
	2018	2019	2020
Indramayu	66.36	66.97	67.29

Sumber: BPS - Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu

Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Indramayu memang meningkat, namun bila dilihat dari persentase penduduk miskin di Kabupaten Indramayu, menunjukkan sisi yang berlawanan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3. Persentase Penduduk Miskin (Persen), 2018-2020

Wilayah Indramayu	Persentase Penduduk Miskin (Persen)		
	2018	2019	2020
Kabupaten Indramayu	11.89	11.11	12.70

Sumber: BPS - Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu

Tabel 4. Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa), 2018-2020

Wilayah Indramayu	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)		
	2018	2019	2020
Kabupaten Indramayu	204.18	191.86	220.31

Sumber: BPS - Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu

Data tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indramayu pada tahun 2020 sekitar 220,31 ribu jiwa (12,70 persen). Berdasarkan hasil data di atas, tingkat kesejahteraan masyarakat dari Program I-MASARO dan program MENG-POSYANDU yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sisi lingkungan tempat tinggal yang bersih dan layak, kemudian kesejahteraan dari sisi kesehatan. Kondisi masyarakat yang terjadi pada hasil penelitian Program I-MASARO dan program MENG-POSYANDU, belum menunjukkan kesejahteraan sosial sebagaimana menurut Segal dan Brzuzy dalam Suud (2006:5) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu nilai kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah kesehatan, kondisi sosial ekonomi, rasa kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat.

KESIMPULAN

Kebijakan program CSR yang dilakukan oleh PT Polytama Propindo belum mencakup seluruh prinsip good governance. Prinsip good governance yang belum dijalankan secara maksimal adalah prinsip profesionalitas, pelayanan prima, efisiensi, efektivitas, dan responsif atau daya tanggap. Kemudian prinsip good governance yang telah dijalankan adalah prinsip akuntabilitas, transparan, demokrasi, dan supremasi hukum.

Program CSR yang berkelanjutan (sustainable) belum berjalan dengan maksimal dikarenakan keputusan program CSR yang dilakukan masih bersifat top-down tanpa proses social mapping atau identifikasi kebutuhan dari masyarakat sebagai penerima manfaat CSR, kemudian program CSR hanya mempunyai efek jangka pendek tanpa adanya program yang berkelanjutan dalam jangka panjang, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam mengikuti program CSR.



Penerapan prinsip good governance yang belum dijalankan secara maksimal oleh PT Polytama Propindo menyebabkan program CSR tidak berjalan secara berkelanjutan (sustainable). Oleh karena itu, dampak dari program CSR yang belum berjalan secara berkelanjutan (sustainable) diantaranya adalah faktor ketergantungan masyarakat terhadap program CSR yang dilaksanakan oleh PT Polytama Propindo, serta dapat memberikan pandangan negatif pada PT Polytama Propindo yang terkesan tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat belum dapat tercapai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bowen, H. R. (1953). *Social responsibility of the businessman*. New York: Harper & Row.
- Brammer, S., Millington, A. (2005). Corporate Reputation and Philanthropy: An Empirical Analysis. *Journal of Business Ethics*, 61(1), 29-44.
- Bungin, Burhan. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada.
- Crowther, David, and Guler Aras. (2008). *Corporate social responsibility*. Ventus Publishing ApS.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC, Congressional Quarterly Press.
- Elkington, John. (1998). *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*. Gabriola Island. BC: New Society Publishers.
- Gulo, W. (2000). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Grasindo Anggota IKAPI.
- Hadi, N. (2011). *Corporate social responsibility*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sukada, Sonny dan Jalal. (2008). Pelaporan Keberlanjutan: Alat Akuntabilitas dan Manajemen. Makalah yang disajikan pada Seminar Dua Hari, Corporate Social Responsibility: Strategy, Management and Leadership, Intipesan, Hotel Aryaduta Jakarta 13-14 Februari.
- Idup Suhady dkk. (2005). *Dasar-Dasar Good Governance*. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara.
- Kraft, Michael E. and Scoot R. Furlong. (2004). *Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives*. Washington: Congress Quarterly Press.
- LAN & BPKP. (2000). *Akuntabilitas dan Good governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. (2016). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, D, Riant. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rahman, Reza. (2009). *Corporate social responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*. Yogyakarta: MedPress.
- Siagian, Sondang P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suud, Mohammad. (2006). *Orientasi Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Halaman Web

- Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Indramayu. Diambil 01 Oktober 2021, dari situs World Wide Web: <https://indramayukab.bps.go.id/indicator/23/109/1/persentase-penduduk-miskin-.html>
- Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Indramayu. Diambil 01 Oktober 2021, dari situs World Wide Web: <https://indramayukab.bps.go.id/indicator/26/48/1/indeks-pembangunan-manusia.html>
- Decentralization: A Sampling of Definitions. *Working paper of Joint UNDP-Government of Germany Evaluation of the UNDP Role in Decentralization and Local Governance*. Diunduh Pada 14 Juli 2021, dari situs World Wide Web: http://web.undp.org/evaluation/documents/decentralization_working_report.PDF

Profil Kesehatan Kabupaten Indramayu. Diambil 01 Oktober 2021, dari situs World Wide Web: <http://dinkes.indramayukab.go.id/wpcontent/uploads/2021/09/Profil-Kesehatan-2020.pdf>
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu. Diambil 01 Oktober 2021, dari situs World Wide Web: <https://dlh.indramayukab.go.id/indikator-kinerja-utama-iku-tahun-2020/>